

JOURNAL OF INTEGRATIVE INTERNATIONAL RELATIONS, Vol:No (YEAR) p-p  
Copyright © Department of International Relations UIN Sunan Ampel Surabaya  
ISSN 2477-3557 (Print)  
DOI: xxx-xxxxxx

# Analisis Kebijakan Demokratisasi sebagai Instrumen Kekuasaan dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Rahmat Sikky

*Universitas Fajar, Makassar, Indonesia*

*E-mail: [rahmatsikky034@gmail.com](mailto:rahmatsikky034@gmail.com)*

Kardina

*Universitas Fajar, Makassar, Indonesia*

*E-mail: [kardina@unifa.ac.id](mailto:kardina@unifa.ac.id)*

## Abstract

*Democratization is US policy which campaign democracy as the norms and values through realist and liberal strategy in foreign politic. This research is aimed to know the interest behind the democratization policy and US authority position globally. This reasearch used national interests concept, foreign policy and foreign politic by applying descriptive analysis method. The result of this research showed that nations thus considered to have violated the democracy principles are a thread to washington intererst occurrence. Democratization as instrument is proven beneficially to US to intervence by economic and military politic to determine democracy standard which affected toward US impact and authority in various country significantly.*

## Abstrak

Demokratisasi merupakan kebijakan Amerika Serikat yang mengkampanyekan demokrasi sebagai norma-norma dan tata nilai melalui strategi realis dan liberal dalam politik luar negeri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kepentingan dibalik kebijakan demokratisasi dan posisi kekuasaan Amerika Serikat secara global. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional, kebijakan luar

negeri, dan politik luar negeri dengan menerapkan metode analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap melanggar prinsip demokrasi adalah ancaman bagi keberlangsungan kepentingan Washington. Demokratisasi sebagai instrumen terbukti menguntungkan Amerika untuk mengintervensi secara politik, ekonomi, dan militer dalam menentukan standar demokrasi yang berdampak signifikan terhadap pengaruh dan kekuasaannya diberbagai negara.

**Keywords: United States of America, National Interest, Foreign Policy, Democratization, Power.**

## **Pendahuluan**

Sejak Perang Dunia Ke-II Amerika Serikat (AS) telah muncul sebagai kekuatan global. Hal itu semakin terlihat pasca Perang Dingin sekitar tahun 1990-an yang menandai berakhirnya bipolaritas AS dan komunis Soviet. Fenomena ini mengantarkan percaturan politik global pada gelombang demokratisasi yang memperlihatkan transisi rezim-rezim non-demokrasi menuju pemerintahan demokrasi baru secara signifikan di Eropa Timur, Eropa Selatan, Asia, dan Amerika Latin. Tercatat bahwa pada tahun 1990 negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi meningkat mencapai 45,4 persen dan hingga saat ini gelombang demokratisasi tersebut terus berlanglun.<sup>1</sup> Proses demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia berkaitan dengan hadirnya AS sebagai adidaya tunggal pasca Perang Dingin, melihat AS yang memantapkan dirinya sebagai jawara demokrasi dan penjaga demokrasi selama periode Perang Dingin dengan kebijakan yang mendukung penyebarannya melalui kampanye dan promosi yang di biayai oleh Washington.

Dewasa ini, AS menjadi patron bagi negara-negara demokrasi baru. Demokrasipun menjadi salah satu isu penting dalam lingkaran pergaulan AS dengan negara-negara lain. Menurut Fawaz A. Gerges, semangat untuk penerapan demokrasi di luar negeri merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam politik luar negeri AS.<sup>2</sup> Praktek demokrasi sudah menjadi pertanyaan mutlak yang diajukan dalam sistem hubungan internasional AS. Sejalan dengan hal tersebut, agar demokrasi tetap eksis, AS tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi ekonomi, politik, dan militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi.<sup>3</sup>

Hanya saja, dilematisnya adalah ukuran demokrasi yang dijadikan indikator oleh AS terhadap suatu negara dengan negara lainnya dapat berbeda.

Terkadang bias terjadi karena unsur kepentingan nasional seringkali berbenturan dengan prioritas pendeteksian pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara. Kasus invasi AS ke Irak pada April 2003 menjadi contohnya. Alasan dari invasi tersebut dikarenakan Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein menjadi negara yang tidak demokratis dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tinggi, represif, mendukung terorisme internasional, dan mengembangkan senjata pemusnah massal.<sup>4</sup> Proses penyelesaian kasus Irak melalui konfrontasi senjata AS mengabaikan penolakan masyarakat internasional yang menginginkan proses secara damai. Dari peristiwa ini, memperlihatkan bahwa pemerintahan yang tidak demokratis menjadi ancaman atas kepentingan nasional AS, melalui kebijakan demokratisasi sebagai instrumen politik luar negeri memberikan keleluasaan untuk mereformasi struktur politik dan ekonomi global yang menguntungkan bagi Washington.

### **Demokrasi & Kepentingan Amerika Serikat**

Selain dari sejarah perkembangan demokrasi yang naik turun sehingga menjadi sistem pemerintahan modern seperti saat ini, demokrasi juga tidak melulu menunjukkan suatu bentuk pemerintahan yang memiliki corak dan latar belakang yang sama. Sebagaimana pendapat Barrington Moore Jr. bahwa jalan yang ditempuh AS dalam membangun pemerintahannya menuju dunia yang lebih modern adalah jalan dengan revolusi borjuis yang berlandaskan perekonomian kapitalis dan sistem demokrasi parlemen. Meskipun terapat stereotipe bahwa demokrasi pertama kali lahir di AS mengingat praktek dan kehidupan demokrasi di AS begitu besar, pada dasarnya AS hanya mengembangkan konsepsi demokrasi yang sudah ada sebelumnya yang kemudian melancarkan revolusi untuk tatanan demokrasi baru sekitar abad ke-18. Sehingga keberadaan demokrasi sebagai nilai-nilai budaya masyarakat AS sudah terintegrasi dalam bagian sejarah bangsa yang sangat kuat dan tidak dapat lagi terpisah dari kehidupan mereka.<sup>5</sup> Demikiran pula dengan pengaruh paham liberal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berdemokrasi AS sebagai suatu negara. Pengalaman dari periode kegelapan Eropa membentuk semangat memperjuangkan kebebasan individu yang menjadi nilai-nilai ideologis dalam budaya masyarakat AS sebagaimana yang ditekankan oleh Samuel P. Huntington tentang demokrasi yang memiliki keterkaitan erat dengan liberalisme, bahwa kebebasan menjadi prinsip fundamental yang khas dari demokrasi.

Untuk itu, sebagai upaya memahami alam pikiran AS bisa ditelusuri melalui gagasan-gagasan George Kennan, seorang ekstrem liberal yang mengepalai Staf Perencanaan Departemen Luar Negeri AS sekaligus *main character* pembentukan tatanan dunia pasca perang. Ide-ide briliannya kemudian diejawantahkan dalam *Policy Planning Study 23* (PPS 23) yang ditujukan untuk Staf Perencanaan Departemen Luar Negeri AS di tahun 1948.<sup>6</sup> “Amerika menguasai sekitar 50% kekayaan dunia, tetapi hanya 6,3% dari total populasi... Dalam situasi seperti ini, tidak bisa tidak, kita menjadi objek rasa cemburu dan benci. Tugas nyata kita pada masa mendatang adalah untuk merencanakan pola-pola hubungan yang akan memperkenankan kita mempertahankan disparitas ini...”<sup>7</sup>. Seiring menjalarnya pemahaman komunisme di Amerika Latin, Kennan menyadari bahwa perlindungan untuk nilai-nilai dasar Amerika Latin dari penyakit komunis harusnya mendapatkan perhatian lebih dari praktik kebijakan luar negeri AS, begitupun negara lainnya yang terancam akan hal yang sama. Segala macam bentuk dukungan terhadap komunisme kemudian dilabeli sebagai pembelot yang harus ditumpas. Lalu cara yang ditempuh melawan para musuh terjelaskan dalam argumentasi Kennan: “Jawaban akhirnya mungkin tak menyenangkan, tetapi... kita tak perlu ragu-ragu menghadapi ancaman ini dengan represi polisi oleh pemerintah lokal. Ini bukanlah tindakan memalukan karena orang-orang komunis pada dasarnya pengkhianat... Lebih baik memiliki rezim dengan kekuasaan kuat ketimbang pemerintah liberal yang ramah dan santai, tetapi rawan dipenetrasi oleh orang-orang komunis.”<sup>8</sup>

Pasca Perang Dunia ke-II, AS yang menang di luar dan tidak hancur di dalam melihat peluang besar atas supremasi dunia. Namun, upaya membangun kekuasaan politik, ekonomi, militer, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi masih dihalangi oleh kekuatan lain, yakni komunisme. Hal ini kemudian menjadi alasan pembentukan kebijakan luar negeri yang berorientasi realis dan liberal secara beruntun untuk membentuk tatanan global pasca perang dunia yang menguntungkan demi terpenuhinya kepentingan negara akan sumber daya dan kekuasaan.

### **Orientasi Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Fitur utama dari kebijakan luar negeri AS sejak tahun 1940-an telah dibentuk dengan dua strategi besar yang menopang tatanan internasional modern. Salah satunya adalah orientasi realis, yaitu upaya mencegah dan menghalangi perluasan kekuatan politik musuh dan menjaga keseimbangan kekuatan global. Dihadapkan dengan Uni Soviet yang berbahaya dan ekspansif tahun 1945, AS melangkah maju mengambil alih posisi yang ditinggalkan Kerajaan Inggris yang melemah dan tatanan Eropa yang runtuh untuk menciptakan keseimbangan kekuatan melawan Stalin dan Tentara Merahnya.<sup>9</sup> Doktrin realis dalam penerapan strategi ini, berbuah hubungan Kerjasama

kelembagaan dan kemitraan untuk AS. Beberapa kerjasama yang memiliki posisi sentral yaitu NATO serta aliansi Amerika Serikat-Jepang, yang keduanya dipimpin oleh AS dengan menjaminkan stabilitas serta perlindungan keamanan bagi sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia Timur.

Kepentingan AS yang dikonsolidasikan dalam strategi lainnya adalah memasukkan agenda liberal dalam kebijakan politik luar negerinya. Upaya ini dilakukan untuk merekonstruksi ekonomi dunia menuju kapitalisme dan perdagangan bebas, agar terbangun suatu tatanan politik yang terlembagakan secara global. Ketakutan terhadap konflik dagang, blok-blok regional, dan persaingan strategis di tahun 1930-an mengharuskan Amerika memperkenalkan demokrasi liberal sebagai sistem pengorganisasian politik pemerintahan modern. Pasar bebas, demokratisasi, dan hubungan kelembagaan multilateral berjalan berdampingan dalam strategi ini. Asumsi yang menjadi dasar strategi tersebut adalah pandangan tentang tatanan sistem internasional yang berbasis aturan, yang mana AS memanfaatkan kekuatan politiknya untuk mendapatkan berbagai aturan yang sesuai dengan keinginannya, guna melindungi kepentingan, memkasakan kekuatan, dan ekspansi hegemoni.

Selama 1990-an, AS terus-menerus menjalankan strategi besar liberal ini. Baik pemerintahan Bush yang pertama maupun Clinton mencoba untuk menyampaikan sebuah visi tatanan dunia yang tak tergantung pada ancaman luar atau pada kebijakan yang eksplisit mengenai perimbangan kekuatan. Bush senior bicara mengenai pentingnya komunitas transatlantik dan menyampaikan gagasan tentang wilayah Asia-Pasifik yang lebih terintegrasi secara penuh. Dalam kedua kasus strategi ini menawarkan sebuah visi positif aliansi dan kemitraan yang dibangun di seputar nilai-nilai bersama, tradisi, timbal-balik kepentingan diri, dan pemeliharaan stabilitas. Pemerintahan Clinton juga berusaha menjabarkan tatanan pasca Perang Dingin dalam pengertian ekspansi demokrasi dan pasar terbuka. Dalam visi ini, demokrasi memberikan landasan untuk komunitas global dan regional, serta perdagangan dan arus modal adalah kekuatan pendorong reformasi politik dan integrasi.<sup>10</sup>

Dalam masa-masa berikutnya, politik luar negeri AS mengacu pada suatu model intervensi, yaitu kebijakan yang mengintervensi bermacam persoalan, baik itu persoalan internasional, urusan regional, maupun urusan domestik. Kebijakan yang dipraktikkan memperlihatkan bahwa keterlibatan AS mengalami peningkatan pasca-Perang Dunia II, bahkan sampai saat ini.<sup>11</sup> Tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di dalam negeri maupun Negara lain, serta kesepakatan internasional yang telah disetujui bersama, AS tak segan-segan melakukan politik intervensi. Politik luar negeri AS sering dibahas dalam konteks ketegangan dialektis antara dua model yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan ungkapan yang berbeda, kebijakan luar negeri AS terombang-ambing antara

politik nyata dan pada sisi lainnya moralisme. Inti dari realisme ini adalah kepentingan nasional, yang berhubungan kuat dengan keamanan nasional. Di sisi lain, legalisme moral menampilkan semangat dan nilai kultural yang lebih mendalam. Norma-norma tersebut mengakar dalam ide-ide sentral keagungan bangsa, bersanding dengan perjuangan kebebasan manusia, kapitalisme, dan demokrasi di lingkup dalam maupun luar negeri.<sup>12</sup>

Secara teoritis dalam konteks politik luar negeri AS dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia untuk mencapai kepentingan nasional (Amerika dan Dunia), terdapat empat kerangka utama. Keempat kerangka tersebut secara singkat dikenal sebagai kerangka kebijakan luar negeri AS untuk mencapai kepentingan nasional, yang terdiri dari kekuasaan, perdamaian, kemakmuran, dan prinsip.<sup>13</sup> Kekuasaan menjadi prioritas utama dalam merumuskan tujuan AS untuk menguasai dunia, mempertahankan diri, dan mempertahankan kemerdekaan dan wilayah nasional. Kekuasaan sebagai salah satu faktor menjadi penting dalam upaya mencegah tindakan agresi dan untuk hegemoni negara lain. Maka dengan power tersebut, aktor dimungkinkan bertindak sebagaimana keinginannya. Dalam konteks praktik penggunaan *power*, Amerika Serikat mengintegrasikan pandangan-pandangan realis dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sementara, kerangka perdamaian secara filosofis dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan tentang kekuatan apa yang diamankan. Pada prinsipnya, AS memposisikan dirinya sebagai penjaga keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh jalannya sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika. Untuk menciptakan perdamaian, AS tidak segan-segan menyatakan perang. Dalam politik luar negeri, ini lebih dikenal dengan istilah "*war to end war*".

Selanjutnya, politik luar negeri AS terutama dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam pemikiran ini, ada beberapa kepentingan ekonomi dalam kebijakan luar negeri AS, antara lain: Kebijakan yang membantu mendapatkan penurunan tarif impor dalam hubungan dagangnya dengan negara-negara lain, menciptakan peningkatan pasar untuk produk ekspor AS, penanaman investasi luar negeri yang membawa keuntungan bagi AS, meningkatkan ekonomi domestik, dll. Banyak teori menjelaskan bahwa penekanan utama kebijakan luar negeri AS adalah pada faktor ekonomi. Secara umum, penekanan ekonomi dalam kebijakan luar negeri AS dibagi menjadi dua prinsip. Pertama, politik luar negeri yang ditekankan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi AS. Indikatornya adalah neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan kondisi makro ekonomi yang sehat. Untuk mencapainya, saat memasuki abad ke-21, kebijakan luar negeri AS menekankan pada efektivitas lembaga internasional yang dirancang untuk meningkatkan keuntungannya (IMF, WTO dan Bank Dunia). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan ketiga lembaga ini dalam rangka menjalankan politik luar negeri AS untuk mencapai kemakmuran.

Tujuan keempat dari kebijakan luar negeri AS adalah prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi nilai, cita-cita dan keyakinan. Dengan prinsip ini, kebijakan luar negeri AS terutama terdiri dari penyebaran akar cita-cita demokrasinya ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, tindakan politik luar negeri AS tidak lepas dari upaya menyebarkan prinsip-prinsip negaranya ke dunia.<sup>14</sup> Keempat kerangka teori tersebut menjadi dasar bagi para pemimpin AS dalam melakukan politik luar negeri dan menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain. Meskipun kebijakan yang diambil oleh masing-masing presiden dikemas dengan sudut pandang yang berbeda, pada prinsipnya kebijakan luar negeri yang dilaksanakan akan tetap bertumpu dan tidak lepas dari keempat prinsip tersebut.

Melihat orientasi politik luar negeri AS dengan dua haluan berbeda antara realis dan liberal yang kemudian berhasil diintegrasikan menjadi suatu pola yang kompleks, membentuk kerangka kerja politik luar negeri yang saling menopang untuk memenuhi kepentingan AS. Dari penjabaran di atas memperlihatkan, bahwa demokratisasi sebagai suatu kebijakan memiliki posisi fundamental di alam pikiran para pengambil keputusan dikarenakan sifatnya yang prinsipil terlepas dari perdebatan ketidaksepahaman nilai-nilai ideologi politik lainnya yang dianggap mengganggu ataupun berpotensi menghalangi kepentingan nasional.

### **Diskusi: Demokratisasi sebagai Instrumen**

Merujuk pada studi hubungan internasional, konsep demokrasi memiliki posisi strategis pada kebijakan politik luar negeri AS. Sepanjang perkembangannya, demokrasi yang diperkenalkan oleh AS tidak lagi sekedar menjadi sistem pengorganisasian politik, namun juga mengambil bentuk lain bertujuan mempolitikasi Negara. Demokratisasi AS berdasarkan analisis dan tinjauan ilmiah Benjamin Miller dapat dibagi menjadi dua jenis paradigma: realisme dan liberalisme. Oleh karena itu, dari dua jenis di atas, mereka sengaja dibagi menjadi dua karakteristik: *ofensif* dan *defensif*, untuk membedakan setiap aplikasi dari sudut pandang perubahan kebijakan demokrasi Washington.

Pembagian jalan realisme menjadi strategi *ofensif* dan *defensif* kembali ke perdebatan penting yang terjadi pada 1990-an. Realisme ofensif berpegang pada keyakinan bahwa perdamaian dunia hanya dapat dicapai dengan menjamin keamanan negara dan mendorong kekuatannya ke tingkat maksimum (superior dan superpower). Unipolaritas atau sistem hegemonik adalah lintasan yang paling menguntungkan bagi keamanan nasional dan perdamaian dunia. Di sisi lain, realisme defensif percaya bahwa negara harus memaksimalkan kekuatan mereka dan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional dengan mengambil langkah-langkah penyeimbangan atau pencegahan terhadap saingan mereka. Dalam kondisi anarki (tidak adanya

negara adidaya dalam tatanan internasional), negara belum membangun aliansi dan meningkatkan senjata jika kondisinya tidak stabil atau memerlukan perang. Dengan kata lain, menciptakan perimbangan kekuatan yang tak berpotensi mengancam, didasarkan pada paradigma *defensif* ketimbang kapabilitas *ofensif*. Hal tersebut diyakini lebih kondusif untuk keamanan nasional dan perdamaian dunia.

Sementara itu, demokrasi yang diusung oleh AS pun meyakini bahwa salah satu dampak terhadap perdamaian dunia adalah pengaktifan kerangka kerja sama berbasis perdagangan dan pasar bebas. Perdagangan dan pasar bebas diyakini menghilangkan keinginan negara untuk berperang dan sebaliknya menginginkan situasi damai sebagai infrastruktur utama untuk membangun model kerjasama. Jenis pemikiran ini jelas muncul dari aliran pemikiran liberal yang selalu berangkat dari asumsi bahwa perdamaian dunia hanya dapat dicapai melalui pengaktifan kerjasama antar negara. Singkatnya, dari dua pemikiran, yaitu realisme dan liberalisme, terdapat kesenjangan makna dan pemahaman sebagaimana yang terlihat dari orientasi politik yang telah diuraikan di atas. Di satu sisi, realisme menitikberatkan pada kesepakatan militer sebagai sarana untuk mendukung tercapainya konstelasi perdamaian, sedangkan di sisi lain liberalisme menekankan nilai-nilai ekonomi, kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia sebagai kunci utama perdamaian. Adapun sarana yang diperlukan untuk mencapai perdamaian, penganut realisme menekankan penggunaan kekuatan militer secara sepihak, sedangkan penganut liberalisme memilih jalan melalui sanksi ekonomi dan insentif melalui mekanisme multilateral lembaga internasional.

Sebagaimana proses demokratisasi pada konteks kebijakan AS, demokrasi dalam strategi liberal ofensif justru mengekang aktor dari suatu regulasi yang diatur dan terpusat pada kebijakan Washington sebagai promotor demokrasi. Benjamin Miller berupaya memperlihatkan suatu keseragaman rezim pemerintahan yang dimungkinkan terjadi secara mendasar dan terintegrasi pada kepentingan AS, untuk memberi kontrol segala hubungan antar aktor negara. Keseragaman yang dimaksud untuk memudahkan mengakomodir serta argumen aksiomatis dari kompleksitas kepentingan nasional Washington. Demokratisasi pada konteks global yang terkonsentrasi dalam diskursus keamanan, kerap kali AS membangun narasi “Polisi Dunia” yang memberikan jaminan perdamaian secara global dan ditunjukkan dengan keterlibatannya melalui kemampuan tempur militer di berbagai kawasan di dunia. Stigma ini tentu menjadi penjamin tegaknya demokrasi atau serangkaian tindakan preventif koersif terhadap negara-negara yang diduga telah melakukan pelanggaran serius terhadap keberlangsungan demokrasi.<sup>15</sup>

Gaya kekuasaan dan cara-cara menggunakan kekuasaan koersif ini telah menjadi dominasi permanen AS untuk melegitimasi kekuasaannya atas negara-



negara demokrasi lainnya, meskipun dalam beberapa pemerintahannya AS tampak menunjukkan cara-cara lunak melalui citra diplomasi publik di beberapa wilayah atau negara yang mulai apatis, acuh, dan semakin waspada terhadap AS, misalnya: di era kepresidenan Barack Obama ketika mencoba mengembalikan citra AS di depan negara-negara mayoritas Muslim yang “kecewa” dengan dampak sikap apatis pemerintahan George Walker Bush dan perilaku koersif sepihak terhadap negara-negara Muslim di Jazirah Arab dan Timur Tengah seperti Palestina, Irak dan Kuwait.<sup>16</sup>

Peran penting AS dalam membangun dan mengelola tatanan demokrasi menjadi semakin sentralistik ketika mereka memutuskan untuk mengambil tanggung jawab dalam membenahi konstelasi global pasca PD II yang sekaligus menjadikan mereka sebagai penjaga keamanan global. Hal ini menjadi rasionalisasi bersama dengan asumsi pemenang perang untuk membentuk aturan yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi terkait dengan pola dan mekanisme interaksi di lingkungan internasional. Sebagai aktor yang memiliki kekuasaan membuat regulasi, AS juga cenderung secara sepihak menentukan pola pemberian *reward and punishment* terhadap objek demokratisasi.<sup>17</sup> Adapun ketergantungan terhadap nilai-nilai demokrasi AS bukanlah alasan tunggal yang membuat negara-negara lain bersandar pada keputusan demokratis AS. Kondisi itu juga merupakan hasil dari penumpukan hutang sejak negara-negara mulai beralih dan menyerahkan dirinya pada demokrasi atau sekedar mencari perlindungan dan keamanan diwaktu yang sama ketika perang berpotensi mengalami peningkatan seperti periode perang dunia dan perang dingin.

Sebagai negara yang dijuluki “juara” demokrasi, AS Serikat kerap menggunakan demokrasi sebagai alat politik luar negerinya. AS sering membuat pernyataan kontroversial dan menyerukan kritik karena menuduh dan mendefinisikan negara lain sebagai negara yang tidak demokratis. Negara-negara Timur Tengah, seperti Irak, Iran, Suriah, dan Libya, selalu didefinisikan oleh AS sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara di dunia yang dianggap tidak demokratis dan melanggar demokrasi biasanya sebagai berikut:<sup>18</sup>

### **Bidang Politik**

Dalam sebuah dokumen tingkat tinggi, para perencana kebijakan AS menyatakan pandangan mereka bahwa ancaman utama bagi tatanan dunia di bawah pimpinan AS adalah nasionalisme Dunia Ketiga yang kerap disebut *Ultranationalism*: rezim nasionalistis adalah respon atas permintaan populer untuk segera meningkatkan standar hidup masyarakat yang masih rendah dan produksi untuk kebutuhan domestik.<sup>19</sup> Ketakutan terhadap rezim nasionalis mengharuskan AS ikut campur dalam aktivitas politik dalam negeri negara-

negara Dunia Ketiga. Semaksimal mungkin mencegah para tokoh nasionalis naik ke tampuk kekuasaan dengan asumsi bahwa pemimpin nasionalis tidak akan membuka peluang ataupun mendukung investasi swasta yang merugikan kepentingan AS. Seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis, bila hasilnya tak dapat dikontrol, bersamaan dengan hal tersebut AS akan memainkan peranannya tersendiri.

AS akan melakukan intervensi, langsung atau tidak langsung, terhadap negara-negara yang menodai nilai-nilai demokrasi dan menerapkan sistem otoriter. Contoh klaim ini adalah invasi AS ke Irak dan Haiti.<sup>20</sup> Dalam kasus Irak, pada tanggal 20 Maret 2003 pukul 05.35 waktu Bagdad, hanya sekitar 95 menit dari berakhirnya ultimatum 48 jam yang ditetapkan AS agar Saddam Hussein mengundurkan diri dari jabatannya, AS menyerang Irak dengan melepaskan rudal jelajah Tomahawk ke seluruh negeri. Kebijakan AS untuk melakukan penyerangan ke Irak ini merupakan langkah AS untuk memerangi terorisme secara global sejak peristiwa terorisme 11 September 2001.<sup>21</sup> Isu terorisme, senjata pemusnah massal, kediktatoran Saddam Husein yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratis serta mengancam keamanan nasional menjadi alasan AS melakukan intervensi politik secara terbuka dan berujung pada penyerangan dengan menggunakan kekuatan militier. Setelah rezim Saddam digulingkan, terjadi pergeseran dari pemerintahan transisi ke pemerintahan permanen di Irak dengan pelaksanaan proses pemilihan. Namun, untuk menyelenggarakan pemilu ini, harus ada pemerintahan sementara yang akan bertugas menyelenggarakan pemilu. Jadi rakyat Irak membentuk pemerintahan sementara. Dalam proses pembentukannya, AS sebagai kekuatan pendudukan memiliki kepentingan untuk ikut serta mengatur jalannya pemerintahan Irak sesuai dengan tujuan awalnya.<sup>22</sup> AS sedang mencoba untuk masuk ke dalam politik dan pemerintahan Irak. AS sebagai penganut demokrasi berperan dan menanamkan pengaruhnya di Irak. Setelah jatuhnya rezim Saddam, Irak tetap lumpuh dalam sistem politik dan pemerintahannya. Inilah yang digunakan AS untuk memasuki politik dan pemerintahan Irak sebagai negara kuat yang memiliki pengaruh dalam proses demokratisasi Irak. Di bidang politik secara umum, serangan AS yang bertujuan mendukung demokrasi di Irak berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein yang dianggap otoriter oleh AS. Demokrasi lahir dari kepentingan AS, yang sangat menginginkan Irak menjadi negara demokrasi.<sup>23</sup>

Beranjak ke kasus lainnya, wilayah Timur Tengah yang kerap kali dianggap identik dengan rezim monarki yang otoriter dan menjadi embrio lahirnya gerakan terorisme dan ekstrimis anti-Barat. Hal tersebut, dalam kacamata Washington tentu berpotensi mengganggu keamanannya. Maka reformasi sistem pemerintahan harus dilakukan untuk mencapai suatu rezim yang mendukung demokrasi, sistem perekonomian kapitalisme, dan pasar bebas. Dimensi kepentingan Washington di Timur Tengah bukan hanya

terkait keamanan nasional, namun mengamankan pasokan minyak tetap stabil serta menjaga citra AS di negara-negara Arab menjadi bagian penting dalam kebijakan demokratisasi. Keseimbangan antara upaya penyebaran ide-ide demokrasi dan cara negara-negara di Timur Tengah harus didikte demi kepentingan sumber daya alam, ancaman terorisme dapat dihilangkan, dan komitmen untuk menjamin keselamatan sekutu abadinya, Israel, itu bisa terwujud.

Peluang demokratisasi di kawasan Timur Tengah terlihat sejak rezim Bashar Al-Assad membungkam kebebasan rakyat dan sejumlah pelanggaran HAM di Suriah. Suriah yang menjadi target AS selanjutnya berhasil menjadi korban dari program promosi demokrasi ini, sehingga bukan tidak mungkin Suriah akan dipaksa untuk membiarkan berbagai LSM dan perusahaan asing masuk ke negaranya, yang intinya hanya menguntungkan kebijakan Washington. Keberhasilan merubah Suriah menjadi negara demokrasi, sistem politik juga secara tidak langsung akan berubah, begitupun sistem perekonomian yang ikut mengarah pada kapitalisme liberal. Pada akhirnya, Suriah akan menjadi negara demokrasi ala AS, tidak demokratis seperti yang diinginkan rakyat Suriah. Tampaknya hanya AS yang memiliki hak untuk menentukan seperti apa negara demokratis itu, dan negara-negara yang pemimpinnya dipilih melalui pemilihan (dan pemilihan telah diselenggarakan dengan cara ini) dan yang pro-Amerika dapat menyebut diri mereka negara demokratis. Lebih lanjut, AS meyakini bahwa negara dengan sistem demokrasi tidak akan menjadi tempat yang subur bagi munculnya gerakan-gerakan Islam radikal yang disebutnya terorisme. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri untuk mendemokratisasi negara-negara Timur Tengah, termasuk Suriah, memang merupakan kebijakan yang paling ideal.<sup>24</sup>

Dukungan AS bagi kelompok oposisi benar-benar termotivasi oleh kepentingan ekonomi, dapat ditunjukkan bahwa sebagai meningkatkan konflik, ada indikasi bahwa kelompok-kelompok oposisi, yang didukung oleh Washington, mencoba untuk menyerang struktur energi Suriah seperti gas dan minyak pipa. Seperti yang terjadi di kota Homs, di mana sekelompok pemberontak atau kelompok oposisi meledakkan pipa minyak dari Suriah timur menuju ke kilang minyak di kota Homs Suriah. Agar AS melihat perlunya melakukan upaya untuk mengubah atau mengelola kondisi ini (sikap dan tren Suriah) agar lebih sesuai dengan keinginan AS, salah satu pilihan paling logis adalah mendukung kelompok oposisi (FSA dan NSC) mengganti rezim yang berkuasa dengan rezim kerjasama baru yang lebih kuat dengan AS.<sup>25</sup> Langkah mendukung kelompok oposisi (FSA dan SNC) untuk mengubah rezim di Suriah dipandang oleh AS sebagai cara terbaik untuk menanamkan pengaruh (kepentingan politik) di Suriah dan untuk menjangkau kepentingan lain, terutama ekonomi. Kemudian Amerika Serikat mulai menunjukkan dukungannya kepada oposisi berupa pionir dalam mengembangkan kebijakan

internasional untuk mengkoordinasikan dan mendukung rakyat Suriah, seperti pembentukan forum “Friends of Syria”, memberikan bantuan tanpa senjata senilai jutaan dolar. Selain itu, senjata dan amunisi juga didistribusikan ke FSA oleh AS dan sekutu Arabnya, dan anggota FSA juga menerima pelatihan khusus di Yordania dari intelijen Israel dan AS.<sup>26</sup>

Kepentingan utama yang ingin dicapai AS dalam mendukung FSA dan SNC adalah untuk berhasil menggulingkan rezim Assad, yang merupakan langkah atau rangkaian tindakan yang dilakukan AS untuk mendapatkan pengaruh di Suriah. Karena kemudian didukung oleh AS adalah SNC dan FSA, hal ini cukup beralasan karena dari sudut pandang AS keduanya dianggap kelompok yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kondisi politik Suriah karena merupakan bagian internal dari negara Suriah yang sudah memiliki lembaga yang lebih terorganisir dari kelompok lain yang ada, serta kedua kelompok ini juga membuka peluang keterlibatan asing di Suriah karena sebagian besar anggota SNC berdomisili di luar Suriah, jadi dari sudut pandang internasional mereka tidak dapat dinilai sebagai kelompok ekstremis atau tergolong teroris, yang pada gilirannya dapat berbahaya. Kepentingan dan agenda AS dan Eropa di Suriah, sehingga kemungkinan memperoleh dukungan dari berbagai negara Eropa terbuka lebar bagi AS, untuk mensponsori setiap aktivitas kedua organisasi (FSA dan SNC) dan mendukung kebijakan AS tentang konflik di Suriah.<sup>27</sup> Pilihan AS untuk mendukung FSA dan SNC (sekarang SNCORF) adalah manifestasi dari kebijakan luar negeri AS yang dapat dianggap sebagai tindakan untuk memberikan pengaruh di Suriah, di mana kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tindakan tersebut, dan dalam hal ini, AS memiliki kemampuan untuk memobilisasi semua sumber daya yang tersedia.<sup>28</sup>

AS secara internasional adalah kekuatan besar yang memiliki kemampuan militer yang mampu mendukung oposisi (FSA) dalam bentuk senjata, amunisi, kendaraan tempur dan semua peralatan perang canggih yang dapat disalurkan ke FSA untuk mengimbangi kemajuan senjata. dimiliki oleh militer Assad yang dipasok, Iran dan Rusia. Selain itu, dalam hal diplomasi, AS juga mampu memobilisasi sumber daya untuk mempengaruhi negara lain dengan membentuk opini publik yang mendorong terbentuknya “Friend of Syria” yang merupakan kumpulan negara-negara yang memiliki kapasitas untuk mendukung kegiatan oposisi dan dapat menarik oposisi bahwa AS ingin terlibat dalam negosiasi dalam mencapai transisi politik untuk menentukan masa depan Suriah sesuai dengan keinginan AS.<sup>29</sup>

### **Bidang Ekonomi**

AS akan melakukan embargo ekonomi terhadap negara-negara yang oleh AS dianggap membahayakan eksistensi demokrasi dan menyengsarakan

rakyat.<sup>30</sup> Contohnya adalah embargo ekonomi yang diberlakukan oleh AS terhadap Jerman, Jepang dan beberapa negara di berbagai kawasan. Selanjutnya, AS selalu menyarankan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, untuk tidak meminjamkan dana kepada negara-negara yang dianggap melanggar demokrasi.<sup>31</sup> Praktik demokratisasi berbasis liberal ofensif yang dideklarasikan menggunakan kekuatan militer yang represif sebenarnya terjadi tepatnya pada Perang Dunia II yang berakhir dengan penyerahan Jerman di Eropa dan Kekaisaran Jepang di Asia kepada pasukan sekutu di bawah AS.

Sebagai contoh, Jepang, karena larangan Pasal 9 konstitusi nasional yang didiktekan oleh AS memenangkan perang, sebenarnya adalah salah satu negara besar yang sampai sekarang belum menyisihkan kekayaannya dikarenakan pembayaran “payung nuklir” Amerika (*policy umbrella*) ke wilayahnya. Ini termasuk pembiayaan terselubung sebagai kesepakatan penyerahan Jepang kepada AS dalam Perang Dunia II, beberapa operasi militer AS dengan tujuan perdamaian global di sebagian besar insiden penaklukan Jepang ke Washington dan sekutunya sekaligus menjadi penutup tekad Jepang untuk menyatukan Asia di bawah kendalinya, namun di balik itu juga menjadi awal sukses lahirnya poros demokrasi AS di Jepang yang merupakan salah satu negara terkuat di Asia yang dapat tentunya akan dijajaki sebagai jangkar promosi demokrasi di Asia di masa depan.

Sebuah studi tentang sistem AS yang diterbitkan oleh *Royal Institute of International Affairs* di London menyimpulkan bahwa, sementara di permukaan AS memainkan peran dalam demokrasi, komitmen sejatinya adalah pada perusahaan kapitalis dan swasta. Ketika hak investor terancam, demokrasi harus ditinggalkan.<sup>32</sup> Langkah yang diambil oleh AS bukanlah sesuatu yang tidak memiliki latar belakang konseptual. Kelompok studi dari Departemen Luar Negeri dan Badan Urusan Hubungan Luar Negeri AS membuat suatu rancangan dunia pasca perang selama Perang Dunia ke-II berlangsung. Rancangan tersebut berisikan wilayah-wilayah yang harus tunduk terhadap kepentingan ekonomi AS yang disebutnya sebagai *Grand Area*. Adapun wilayah yang disebutkan dalam *Grand Area* yaitu Eropa Barat, Timur Jauh, bekas Imperium Britania, Timur Tengah dengan sumber energinya yang melimpah, Negara Dunia Ketiga dan seluruh dunia jika hal tersebut memungkinkan. Disetiap wilayah yang termasuk dalam rancangan *Grand Area* diberi fungsi sebagai sumber bahan mentah dan objek pasar bagi negara industri kapitalis. Hal ini kemudian terjelaskan melalui mandat dalam memo Departemen Luar Negeri AS di tahun 1949 bahwa Negara Dunia Ketiga berfungsi untuk dieksploitasi.

Namun penolakan terhadap fungsi yang diberikan tidak bisa dihindari. Munculnya perang Vietnam adalah gejala atas penolakan fungsi mereka sebagai Negara Dunia Ketiga yang harus dieksploitasi. Vietnam merupakan

contoh nyata dari ketakutan AS terhadap rezim nasional yang mendapatkan kemerdekaannya dan akan berbahaya jika menjadi inspirasi bagi negara-negara Dunia Ketiga diwilayah Asia Tenggara terlepas dari para pemimpin Vietnam yang komunis. Maka mereformasi politik Vietnam dengan serangan militer adalah tindakan kepahlawanan menurut AS. Untuk memenuhi kepentingan Washington, pada dasarnya penyebaran, dukungan, dan pembinaan demokrasi hanya menjadi kampanye-kampanye politik demi kebutuhan imperial AS. Sebagaimana argumentasi William Blum, seorang pakar *anti-mainstream* di bidang kebijakan luar negeri yang meninggalkan Kementrian Luar Negeri AS di tahun 1967: "AS tidak peduli apa yang disebut demokrasi, tidak peduli berapa kali presiden AS menggunakan kata itu setiap kali dia membuka mulutnya. Sejak 1945, AS telah mencoba untuk menggulingkan lebih dari lima puluh pemerintah yang sebagian besar dipilih secara demokratis dan dengan keras ikut campur dalam pemilihan demokratis setidaknya tiga puluh negara. Pertanyaannya adalah: apa yang dimaksud AS dengan demokrasi? Yang mereka pikirkan hanyalah segala bentuk demokrasi ekonomi. Apa yang mereka pikirkan adalah memastikan bahwa negara tujuan memiliki mekanisme politik, keuangan, dan hukum yang sesuai dan bersahabat untuk globalisasi perusahaan."<sup>33</sup>

Apa yang dialami oleh Vietnam hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus intervensi yang dilakukan AS. Komitmen demokratisasi Washington hanya ditujukan untuk pemerintahan suatu negara yang tak bisa diajak kompromi. AS dengan senang hati mendukung suatu pemerintahan yang dianggap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis lalu memusnahkan rezim nasionalis otoriter. Namun, disisi lain terungkap fakta dukungan Washington terhadap rezim otoriter yang tiran dan represif sebagaimana pemerintahan Marcos di Filipina. Lebih lanjut, AS tidak terlalu memaksa beberapa negara di kawasan tertentu untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, selama Washington selalu diizinkan untuk memiliki akses penuh untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Misalnya, sikap persuasif AS terhadap negara-negara Teluk, yang berujung pada kepentingan sepihak terkait dengan ketersediaan pasokan minyak mentah yang tidak terbatas. Sebagaimana diberitakan dan diketahui, konteks hubungan AS dengan negara-negara Teluk tergolong sangat transaksional.

AS, dalam mengamankan kepentingan nasionalnya, memposisikan diri sebagai penyedia jasa keamanan bagi pemerintahan yang harmonis dan absolut dan mode pemerintahan di negara-negara Teluk yang masih sangat kuat dalam menerapkan budaya dan tradisi monarki atau kesultanan tanpa mengharuskan penerapan demokrasi pada mereka. Sejak peristiwa tersebut, demokratisasi AS jelas telah membuat beberapa diferensiasi terhadap beberapa negara, dan bahkan untuk beberapa kawasan.

Di bidang ekonomi dalam menyokong proses demokratisasi tak hanya tindakan embargo yang diperlihatkan AS, contoh lain yang bisa dijadikan tinjauan adalah bantuan ekonomi yang diberikan AS terhadap pemerintah Taiwan sebesar 4 milyar US\$ pada tahun 1951.<sup>34</sup> Pada periode tersebut, bipolaritas pasca Perang Dunia Ke-II tentu menjadi alasan Washington untuk memberikan bantuan sebagai upaya menghegemoni wilayah Asia Timur dengan menjadikan Taiwan sebagai sasaran. Melihat pertumbuhan ekonomi Cina yang stabil dan Taiwan yang terus memburuk sehingga membuat Taiwan ingin melepaskan diri dari wilayah teritorial Cina. Demokratisasi yang dialami Taiwan yang disokong AS secara geo-strategis akan memperlihatkan citra baik bagi negara-negara dikawasan Asia Timur dan mempermudah membendung ekspansi diktator komunisme Cina.

### **Bidang Militer**

AS akan melakukan embargo senjata terhadap negara mana pun yang dianggap militernya melanggar nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Contohnya adalah Indonesia yang terkena embargo senjata dari kasus Timor Timur, sehingga militer Indonesia kesulitan untuk memasok suku cadang senjatanya.<sup>35</sup> Bagi Indonesia, mau tidak mau, persoalan itu mendapatkan perhatian khusus. Dalam berbagai pertemuan internasional, demokratisasi selalu saja dimunculkan menjadi topik utama. Berbagai masalah mengenai pelaksanaan demokratisasi dan hak asasi manusia senantiasa dipertanyakan ke Indonesia. Dari pecahnya demonstrasi berdarah di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, 12 November 1991; Hubungan AS dan Indonesia mengalami pasang surut, terutama dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Kasus tersebut mendorong AS untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Salah satu sanksinya adalah pencabutan bantuan militer berupa *International Military Education and Training (IMET)*, Oktober 1992, karena militer dianggap bertanggung jawab atas kerusuhan berdarah di Dili. Baru tiga tahun kemudian, bantuan IMET kembali dicairkan oleh Kongres AS yang dikuasai oleh Partai Republik.<sup>36</sup>

Berbeda dengan yang dialami Indonesia, pada tahun 2010-2012 Kamboja justru mendapatkan bantuan militer dari pemerintahan AS. Munculnya kembali gerakan Khmer Rouge melalui gerakan anti kolonialisme dengan sejumlah aksi teror yang ingin mengembalikan kejayaan komunis di wilayah Kamboja menjadai ancaman terhadap kekuasaan AS di negara tersebut dan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara dibidang perdagangan dan bisnis internasional pada konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, beberapa kebijakan AS dalam menyikapi perkembangan gerakan Khmer Rouge di Kamboja adalah sebagai berikut:<sup>37</sup> pertama, kebijakan Amerika Serikat memberikan bantuan militer ke Kamboja; kedua, AS melakukan latihan militer bersama dengan Kamboja; ketiga, AS menambah jumlah personel militer di Kamboja. Dengan

harapan kebijakan tersebut mampu menghilangkan gerakan Khmer Rouge yang mengancam kepentingan ekonomi dan stabilitas demokrasi.

Dalam konteks nilai-nilai demokrasi yang mengangkat hak asasi manusia dan martabat manusia, hal ini jelas menjadi paradoks jika dikaitkan dengan mekanisme yang dilakukan AS dalam memajukan demokrasi, terutama terhadap negara-negara yang dianggap AS sulit untuk dijinakkan. Paradoks ini semakin hidup akibat ketidakmampuan negara demokrasi lain untuk memblokir unilateralisme yang dilakukan AS terhadap negara-negara yang telah menjadi praktik "domestikasi". Dari sekian banyak negara yang disebutkan di atas, hanya segelintir negara di jalan menuju kekuasaan dengan latar belakang demokrasi yang terpaksa menerima keganasan AS melalui jargon demokrasinya. Jika demokrasi merupakan keniscayaan bagi terciptanya perdamaian global, maka AS sebagai bapak demokrasi seharusnya tidak bisa membuat pengecualian.

## **Kesimpulan**

Meskipun secara umum demokrasi diakui sebagai suatu pemahaman yang universal. Namun pada realitas praksisnya di setiap negara menemukan interpretasi yang beragam sehingga berujung pada pengorganisasian pemerintahan yang berbeda-beda. Komitmen kebebasan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan demokratisasi AS hanya sebatas bagian dari strategi kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional dan berkuasa secara global dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara simultan. Disisi lain, kebijakan demokratisasi memberi manfaat perlindungan terhadap keamanan nasional AS dari ancaman rezim otoritarian yang dianggap sebagai tempat tumbuh kembangnya terorisme dan ekstrimis anti-barat. Hal tersebut terlihat dari campur tangan AS dalam proses perpolitikan domestik di beberapa negara untuk memastikan terjadinya reformasi politik menuju rezim demokratis yang kooperatif terhadap kepentingan-kepentingan Washington.

Adapun pemimpin negara yang terpilih secara demokratis, bila tak mampu mengakomodir kepentingan AS maka rezim tersebut akan disingkirkan dengan menyokong kelompok-kelompok oposisi agar bisa menumbangkan dan mengambil alih kekuasaan. Fenomena ini, menunjukkan sikap AS yang tidak konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang sering dikampanyekannya.

Secara umum, kepentingan nasional merupakan hal yang fundamental dari keberlangsungan suatu negara. Demokratisasi sebagai kebijakan luar negeri AS dimanfaatkan untuk mengejar kepentingan tersebut dengan strategi politik luar negeri yang beragam melalui penggunaan kapasitas kekuasaan dibidang politik, ekonomi, dan militer. Berdasarkan yang telah dijabarkan sebelumnya,



bahwa dalam konteks hubungan internasional kebijakan demokratisasi merupakan instrumen yang kuat bagi negara maju seperti AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Sebagai sistem mapan dan pemerintahan yang memiliki kemampuan lebih dari negara lain, AS memiliki kendali tak terbatas dalam eksplorasi nilai-nilai demokrasi. Seiring dengan hadirnya globalisasi, peran AS semakin krusial dan fleksibel dalam konstelasi internasional. Fenomena ini akan selalu memunculkan dimensi eksploitatif yang menguntungkan AS dalam praktik politik luar negerinya terhadap negara-negara yang tidak menghargai nilai-nilai demokrasi.

## Endnotes

- 
- <sup>1</sup> Huntington, S. P. 2000. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Press. Hlm. 147.
- <sup>2</sup> Gerges, A. Fawaz. 2002. *Amerika dan Islam Politik : Benturan Pradaban atau Benturan Kepentingan?*. Terjemahan oleh Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. Jakarta: Alfabeta. Hlm. 7.
- <sup>3</sup> Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*. Yogyakarta: Bigrif Publishing. Hlm. 11.
- <sup>4</sup> Nasir Badu, Muhammad. 2015. Democracy and the United States of America. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1*. Hlm. 11.
- <sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 13.
- <sup>6</sup> Chomsky, Noam. 2016. *How The World Works*. Penerbit Bentang. Yogyakarta. Hlm. 5-6
- <sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 6.
- <sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 7.
- <sup>9</sup> A. Paraemon, Yusi, dan Rofiqi, A. Zaim. 2005. *Amerika & Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*. Keduataan Besar Amerika Serikat-Jakarta, Freedom Institute, & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hlm. 435.
- <sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 347.
- <sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 22.
- <sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 23.
- <sup>13</sup> G. John Ikenberry. 2007. *American Foreign Policy Theoretical Essay*. New York. Hlm. 8.
- <sup>14</sup> *Ibid.* hlm 15.
- <sup>15</sup> Arifianto, Muhammad Lukman. *Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat: Promosi dan Trajektorinya*. Jurnal Keamanan Nasional Vol.III, No. 2, November 2017. Hlm. 204.
- <sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 204.
- <sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 215.
- <sup>18</sup> Tippe, Dr.Syarifuddin, dan Subagyo, Dr. Agus. 2016. *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Penerbit Alfabeta, Bandung. Hlm. 25.
- <sup>19</sup> Chomsky, Noam. 2016. *How The World Works*. Penerbit Bentang. Yogyakarta. Hlm. 15.
- <sup>20</sup> Tippe, Dr.Syarifuddin, dan Subagyo, Dr. Agus. 2016. *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Penerbit Alfabeta, Bandung. Hlm. 25.
- <sup>21</sup> Gracia, Debora. 2007. *Peranana Paul Wolfowitz dalam Pengambilan Keputusan Luar Negeri Amerika Serikat (Kasus: Kebijakan AS Menyerang Irak 20 Maret 2003)*. Global and Strategis, Th I, No.1. Hlm. 26.
- <sup>22</sup> Tisa, Mel Arlette, dan Nizmi, Yusnarida Eka. *Pengaruh Intervensi Amerika Serikat Terhadap Inflasi & Pengangguran Irak (2007-2012)*. Hlm. 5.
- <sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 6.
- <sup>24</sup> Rakhmadi, Roby. 2012. *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi Militer NATO ke Libya*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. Hlm. 28.

- 
- <sup>25</sup> Christopher Philips, *Syria's Bloody Arab Spring*, *London School of Economic and Political Science* dalam skripsi Bayu Aji Bagus Prasetyo, *Bantuan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah*. Hlm.65
- <sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 66.
- <sup>27</sup> Herawati Sitorus, Tina. 2018. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik Suriah 2011-2013*. Skripsi. Medan: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara. Hlm. 97.
- <sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 99.
- <sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 99-100.
- <sup>30</sup> Tippe, Dr. Syarifuddin, dan Subagyo, Dr. Agus. 2016. *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Penerbit Alfabeta, Bandung. Hlm. 25
- <sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 25
- <sup>32</sup> Chomsky, Noam. 2016. *How The World Works*. Penerbit Bentang. Yogyakarta. Hlm. 17.
- <sup>33</sup> Blum, William. 2013. *Demokrasi; Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Penerbit Bentang. Yogyakarta. Hlm. 3.
- <sup>34</sup> Wulan Apriliyani, Ni Putu. *Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat terhadap Taiwan Tahun 1951-1965*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- <sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 25.
- <sup>36</sup> Hertanto, Ichlasul Amal, dan Budi Winarno. 1997. *Perubahan Politik Global & Perkembangan Demokratisasi Di Indonesia 1985-1995*. BPPS Universitas Gadjah Mada. Hlm. 550-551.
- <sup>37</sup> Fransisco Simanjuntak, Randi & Harto, Syafri. *Motivasi Amerika Serikat Memberikan Bantuan Militer Kepada Kamboja Tahun 2010-2012 (Studi Kasus Terorisme Khmer Rouge)*. Hlm. 8-13.

## Daftar Pustaka

- A. Paraemon, Yusi, dan Rofiqi, A. Zaim. 2005. *Amerika & Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*. Keduataan Besar Amerika Serikat-Jakarta, Freedom Institute, & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arifianto, Muhammad Lukman. *Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat: Promosi dan Trajektorinya*. Jurnal Keamanan Nasional Vol.III, No. 2, November 2017.
- Blum, William. 2013. *Demokrasi; Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Penerbit Bentang. Yogyakarta.
- Chomsky, Noam. 2016. *How The World Works*. Penerbit Bentang. Yogyakarta.
- Christopher Philips, *Syria's Bloody Arab Spring*, *London School of Economic and Political Science* dalam skripsi Bayu Aji Bagus Prasetyo, *Bantuan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah*.
- Fransisco Simanjuntak, Randi & Harto, Syafri. *Motivasi Amerika Serikat Memberikan Bantuan Militer Kepada Kamboja Tahun 2010-2012 (Studi Kasus Terorisme Khmer Rouge)*.
- Gerges, A., Fawaz. 2002. *Amerika dan Islam Politik : Benturan Pradaban atau Benturan Kepentingan?* Penerjemah : Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib, Alvabet, Jakarta.
- Gracia, Debora. 2007. *Peranana Paul Wolfowitz dalam Pengambilan Keputusan Luar Negeri Amerika Serikat (Kasus: Kebijakan AS Menyerang Irak 20 Maret 2003)*. Global and Strategis, Th I, No.1.
- G. John Ikenberry. 2007. *American Foreign Policy Theoretical Essay*. New York.
- PAGE                      Volume x, Number x, Month YEAR

- 
- Hertanto, Ichlasul Amal, dan Budi Winarno. 1997. *Perubahan Politik Global & Perkembangan Demokratisasi Di Indonesia 1985-1995*. BPPS Universitas Gadjah Mada.
- Herawati Sitorus, Tina. 2018. *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik Suriah 2011-2013*. Skripsi. Medan: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara.
- Huntington, S. P. 2000. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Press.
- Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Nasir Badu, Muhammad. *Democracy and the United States of America*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January, 2015.
- Roby Rakhmadi, —*Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi Militer NATO ke Libya 2011*. Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012.
- Tippe, Dr. Syarifuddin, dan Subagyo, Dr. Agus. 2016 *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tisa, Mel Arlette, dan Nizmi, Yusnarida Eka. *Pengaruh Intervensi Amerika Serikat Terhadap Inflasi & Pengangguran Irak (2007-2012)*.
- Wulan Apriliyani, Ni Putu. *Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat terhadap Taiwan Tahun 1951-1965*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.